

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui mengenai fenomena *Flypaper Effect* yang terjadi akibat dari hubungan variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah. Obyek penelitian ini adalah laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah kabupaten dan kota. Ruang Lingkup penelitian ini mengambil lokasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013. Dari kriteria-kriteria sampel, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 26 Kabupaten/Kota per tahunnya sehingga observasi yang digunakan adalah 130 Kabupaten/Kota dan terdapat 2 data *outlier* yang harus dibuang untuk kepentingan analisis sehingga jumlah observasi yang digunakan menjadi 128 observasi.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka terdapat 4 (empat) simpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Artinya, besarnya nilai PAD mempengaruhi besarnya Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009-2013. Hal ini dikarenakan PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari segala upaya

pemerintah daerah dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi-potensi dari sumber daya daerahnya yang dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga semakin besar PAD yang diperoleh maka semakin besar pula Belanja yang harus dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan tersebut.

2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009-2013. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Dana Alokasi Umum sebagai pendapatan daerah menyebabkan pemerintah daerah merasa terdorong untuk lebih meningkatkan Belanja Daerah. Hal ini juga disebabkan oleh faktor kebijakan atas pemberian DAU, sehingga terdapat kecenderungan pemerintah daerah untuk Belanja menggunakan dana anggaran daerah menggunakan DAU.
3. Telah terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009-2013. *Flypaper Effect* yang terjadi diikuti oleh Belanja Daerah berdasarkan dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang masih didominasi oleh DAU menunjukkan pemerintah daerah yang masih belum mandiri karena pendapatan aslinya belum dapat menutupi pengeluaran daerahnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kesiapan fiskal pemerintah daerah masih rendah sehingga terjadi respon berlebihan terhadap DAU dan menunjukkan pemerintah daerah kurang mengoptimalkan sumber-sumber yang menjadi potensi PADnya sehingga perkembangan

daerah belum maksimal dan masih membutuhkan DAU dari pemerintah pusat, serta fenomena ini akibat model Birokratik.

4. *Flypaper Effect* berpengaruh positif pada prediksi Belanja Daerah di tahun berikutnya pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2013. Hal ini disebabkan oleh sistem penganggaran *incrementalism* yang menyusun besarnya anggaran dilakukan berdasarkan perubahan kenaikan atau penurunan dari angka PAD dan DAU pada tahun berjalan. Sehingga ketika terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pada tahun berjalan, maka fenomena tersebut akan terus berlanjut pada tahun berikutnya apabila pemerintah daerah secara terus-menerus lebih cenderung untuk menghabiskan anggaran DAU daripada anggaran PADnya dan hal tersebut cenderung terus akan mempengaruhi peningkatan Belanja Daerah pada tahun Berikutnya.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan implikasi yang diharapkan dapat berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Pusat

Fenomena *Flypaper Effect* di dalam penelitian ini mengakibatkan kecenderungan pemerintah daerah untuk menanti DAU dari pemerintah pusat dibandingkan dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah yang menjadi sumber PAD. Sehingga masih terdapat unsur ketergantungan daerah

kepada pemerintah pusat yang berdampak pada kurangnya kemampuan kemandirian daerah yang bersangkutan. Karena secara langsung pemberian DAU kepada daerah yang berarti pemerintah pusat memberikan subsidi pengeluaran daerah untuk mengurangi beban daerah. Sehingga berdampak pada lemahnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri.

Hasil penelitian *Fenomena Flypaper* juga memperlihatkan perilaku pemerintah daerah yang tidak seperti biasanya. Terdapat kecenderungan untuk melakukan manipulasi pengeluaran pemerintah setinggi mungkin agar DAU habis digunakan. Karena apabila anggaran DAU habis digunakan pada tahun berjalan, maka pemerintah daerah akan memperoleh DAU yang lebih besar di tahun berikutnya.

Oleh karena itu pemerintah pusat sebaiknya melakukan peningkatan kinerja monitoring dan evaluasi pada pemerintah daerah dalam rangka memonitor, mengontrol, dan mengevaluasi penggunaan dana DAU dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sangat penting dilakukan. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah respon berlebihan terhadap penggunaan penerimaan DAU di daerah. Sehingga tujuan pemberian DAU sebagai konsekuensi pemerintah pusat dari kegiatan otonomi daerah untuk menjadikan suatu daerah otonom yang mandiri, yaitu menjadi daerah yang memiliki PAD yang tinggi yang dapat memenuhi Belanja Daerahnya sendiri tanpa terus mengandalkan DAU dari pemerintah pusat dapat terwujud.

Selain itu, besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan aset daerah menjadi faktor yang menyebabkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran pengawasan terhadap kinerja pemerintah rendah. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi.

2. Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa fenomena *Flypaper Effect* menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasil pertumbuhan PAD, seperti peningkatan penerimaan pajak daerah, serta sumber daya alam lainnya. Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang berupa DAU memiliki jumlah yang sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari segala upaya pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya daerahnya yang berdampak pada pertumbuhan PAD. Karena pemerintah daerah mengandalkan DAU daripada PAD maka pemerintah daerah pun merasa Belanja Daerah dapat dipenuhi dengan menggunakan DAU sehingga pertumbuhan PAD kurang dioptimalkan.

Untuk itu, Pemerintah daerah seharusnya lebih berupaya untuk mengurangi peran DAU terhadap Belanja Daerahnya dengan memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan PAD. Sehingga peningkatan PAD di tahun berikutnya dapat diiringi dengan penurunan DAU di tahun berikutnya. Jumlah DAU dari pemerintah pusat yang tergolong tinggi dibandingkan jumlah PAD yang dihasilkan pemerintah daerah tidak menjadi suatu masalah apabila DAU tersebut digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah dan benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pelayanan publik yang akan berdampak pada pertumbuhan PAD.

3. Masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pembangunan daerah juga perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat mempunyai tugas untuk melayani kesejahteraan publik, karena dana DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah dan PAD yang dihasilkan oleh pemerintah daerah berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memiliki peran serta dalam mengawasi dan menyampaikan aspirasi pada kegiatan pemerintahan untuk mendukung kemajuan pertumbuhan ekonomi daerah kearah yang lebih baik.

C. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya adalah:

1. Penelitian selanjutnya dapat memasukan Kabupaten/Kota di luar provinsi Jawa Barat dan kemudian membandingkan keduanya, sehingga semakin banyak diketahui daerah mana saja yang sudah mandiri ataupun yang belum mandiri dan agar kemungkinan kedepan lebih banyak temuan-temuan analisis yang lebih bervariasi
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jangka waktu yang lebih lama agar menghasilkan data yang lebih komprehensif dan akurat
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan membandingkan data sebelum otonomi dan setelah otonomi daerah dilakukan.